KONSTRUKSI BERITA LARANGAN PEMAKAIAN JILBAB PADA SITUS WWW.REPUBLIKA.CO.ID

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Disusun oleh:

Ita Septiyani
Nim 10210077

Pembimbing:
Saptoni, S.Ag., M.A
NIP. 19730221 199903 1 002

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856,Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1862 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

KONSTRUKSI BERITA LARANGAN PEMAKAIAN JILBAB PADA SITUS WWW.REPUBLIKA.CO.ID

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: ITA SEPTIYANI
NIM/Jurusan	: 10210077/KPI
Telah dimunaqasyahkan pada	: Rabu, 22 Oktober 2014
Nilai Munaqasyah	: 95 (A)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Saptoni, S.Ag., M.A.
NIP 19730221 199903 1 002

Penguji II,

Dr. H. Akhmad Rifai, M.Phil.
NIP 19600905 198603 1 006

Penguji III,

Ristiana Kadarsih, S.Sos., M.A.
NIP 19770528 200312 2 002

Yogyakarta, 27 Oktober 2014
Dekan,

Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jln. Marsda Adi Sucipto. Telp 0274 - 515856, Yogyakarta, 55381, E-mail fd@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Kepada

YTH. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Ita Septiyani
Nim	: 10210077
Jurusan	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi	: **"Konstruksi Berita Larangan Pemakaian Jilbab Pada Situs www.republika.co.id"**

Sudah dapat diajukan kembali kepadaFakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui
Ketua Jurusan

Khoirotimmatin, S.Ag.,M.Si.
NIP. 19710328 199703 2 001

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Pembimbing

Saptoni, S.Ag., M.A.
NIP: 19730221 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ita Septiyani

Nim : 10210077

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **"Konstruksi Berita Larangan Pemakaian Jilbab Pada Situs www.republika.co.id"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya jadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

ıng Menyatakan

...ı Septiyani

NIM. 10210077

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ita Septiyani

NIM : 10210077

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengenakan jilbab. Demikian pernyataan ini saya buat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Yang menyatakan

Ita Septiyani
10210077

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. *Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan segenap cinta dan kasih sayangnya untukku, I love you almost full.*
2. *Adikku tersayang Andre Hermawan, semoga menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan bisa membanggakan.*
3. *Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

MOTTO

Tulisan boleh memukau, pidato boleh mempesona, tapi jika tidak diikuti "you're not a leader"

Gelap tak bisa mengusir gelap, hanya terang yang bisa. Kebencian tak bisa melawan kebencian, hanya cinta yang bisa.

(Martin Luther King)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Sholawat serta salam akan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Sang Pencipta yang membawa penerangan zaman. Melalui perjalanan yang panjang, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi berjudul **"Konstruksi Berita Larangan Jilbab Pada Situs www.republika.co.id".**

Ketertarikan penulis di bidang media massa menjadi suatu kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Melalui skripsi ini penulis mencoba mencurahkan hal yang berbeda dan membongkar bagaimana konstruksi berita larangan jilbab di situs republika *online.* Terlihat jelas ketika republika *online* memuat berita di websitenya, unsur islami masih sangat kental dan itu sangat jelas ditunjukkan dalam isi berita yang sebagian besar merupakan berita tentang keagamaan.

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan yang ada. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan gambaran awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang analisis wacana kritis pada media massa khususnya *new media.*

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Musa Asy'ari.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Waryono, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si.
4. Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan motivasi.
5. Saptoni, S.Ag, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, saran, dan motivasi.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bang Erisandi Arditama yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan, terimakasih atas ilmu dan kesabarannya.
8. Segenap kader HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Sahabat-sahabatku Fitriani Nasution, Ayu Andira, Ana, Chusniyatul, Vina Akfa Dyani, Bang Azis, dan Akbar, terimakasih telah memberikan warna untuk hidupku selama di Jogja.
10. Segenap Crew LAPMI Sinergi (Bang Husni, Bang Irfan, Faruq, Fendy, Azim, Bang Dayat dan yang lainnya) terimakasih telah mengijinkan untuk berkarya.

11. Kawan-kawan kader HMI Cabang Bulaksumur Bang Hendra, Mbak Intan Maliza, Kak Ivo, dan Bang Fauzan yang selama ini mau direpoti.
12. Segenap kawan-kawan Turun Tangan Jogja (Mas Haris, Mas Hatta, Mas Reza, Mas Lupet, Rifky, Adit, Fariz, Emma, Mbak Firda, Mbak Pudem, Pras, dan Apri).
13. Segenap Kawan-kawan KPI 2010 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Kepada semua pihak tersebut semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Penulis,

ITA SEPTIYANI

NIM 10210077

ABSTRAK

Ita Septiyani 10210077. Skripsi "Konstruksi Berita Larangan Pemakaian Jilbab Pada Situs www.republika.co.id".

Media sudah sejak lama berdiri dan memiliki fungsi sebagai kontrol sosial. Memasuki era globalisasi media berkembang dan semakin canggih dalam sistem akses, berita-berita mengenai kasus larangan pemakaian jilbab banyak dipublikasikan diberbagai media pada edisi Maret 2014, baik media cetak maupun elektronik, tak terkecuali media *online* situs www.republika.co.id yang merupakan media yang memiliki basis keislaman yang kuat. Republika *online* adalah sayap dari Surat kabar Republika yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pemberitaan dan rubrikasi lebih banyak mengacu pada berita Islami. Republika *online* mencoba membongkar dan mengkonstruksi kasus larangan pemakaian jilbab di SMA Negeri Bali dilihat dari kacamata Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni penelitian yang berusaha mengetahui konstruksi berita yang dibangun oleh media Republika *online* mengenai kasus pelarangan jilbab di SMA Negeri Bali.

Setelah melakukan analisis dengan menggunakan konsep *Critical Discourse Analysis* (CDA) yang diterapkan oleh Teun Van Dijk pada tingkat teks maka diperoleh kesimpulan bahwa Republika *online* menggunakan struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Pada struktur mikro semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris digunakan semua meskipun detil pada semantik lebih ditonjolkan. Ditinjau dari analisis konsep Van Dijk, secara garis besar kecenderungan berita yang di konstruksi oleh Republika *online* dalam pemberitaan kasus larangan pemakaian jilbab di SMA Negeri Bali pertama, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), tidak seharusnya pihak sekolah memberlakukan tidak adil terhadap siswa yang beragama minoritas. Kedua, otonomi sekolah bertentangan dengan UU Sisdiknas Nomor 23 Bab 5, SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991 dan UUD 1945. Ketiga, semestinya dalam menjaga kearifan lokal tidak boleh ada pelarangan pemakaian jilbab untuk menjaga kedamaian umat.

Kata Kunci : Jilbab,Sekolah Negeri, Bali, HAM, Kearifan Lokal, Otonomi Sekolah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 3
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Tinjauan Pustaka 7
G. Kerangka Teori 11
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 27

BAB II : KEARIFAN LOKAL DAN MAKNA JILBAB BAGI MASYARAKAT BALI 29

A. Kondisi Umum Masyarakat Bali 29
B. Kearifan Lokal Bali 30
C. Otonomi Sekolah 32
D. Pluralisme dan Konflik Sosial 35
E. Jurnalisme di Republika Online 38

BAB III : KONSTRUKSI BERITA LARANGAN PEMAKAIAN JILBAB PADA SITUS WWW.REPUBLIKA.CO.ID 42

A. Jilbab dan Kearifan Lokal 44
B. Jilbab dan Hak Asasi Manusia 57
C. Jilbab dan Otonomi Sekolah 104

BAB IV PENUTUP 149

A. Kesimpulan 150
B. Saran-saran 152

DAFTAR PUSTAKA 152

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Konstruksi Berita Larangan Pemakaian Jilbab Pada Situs www.republika.co.id

1. Konstruksi

   Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan.[1] Sedangkan dalam penelitian ini konstruksi yang dimaksud adalah bagaimana seorang wartawan menyusun fakta dan menyajikannya menjadi sebuah berita yang nantinya akan disebarluaskan kepada khalayak melalui media massa.

2. Berita

   Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang.[2] Dalam penelitian ini berita yang dimaksud adalah berita mengenai kasus larangan pemakaian jilbab di SMA Negeri di Bali pada situs www.republika.co.id pada Maret 2014.

---

[1] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 590.

[2] Onong Udjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.131.

3. Larangan Pemakaian Jilbab

"Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan".[3] Sedangkan "Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada".[4]Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah suatu perbuatan mengenakan jilbab yang tidak diperbolehkan dan tidak ada satupun orang yang boleh melanggarnya, aturan tersebut berlaku untuk suatu kelompok atau instansi tertentu.

4. Situs www.republika.co.id

Republika.co.id merupakan media *online* dari Surat Kabar Republika. Seiring perkembangan arus informasi yang semakin canggih, media mengalami perkembangan yang signifikan. Republika terbit pada 4 Januari 1993 yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Republika *online* memiliki fitur baru yaitu terdiri dari percampuran komunikasi media digital diantaranya animasi, audio, video, dan peningkatan kontrol pengguna. Kelebihan dari republika.co.id adalah pada kecepatan berita, memiliki interaktivitas, *hypertext*, dan multimedia.

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah berita yang dikonstruksi oleh wartawan Republika *online* yang disampaikan

---

[3] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* hlm. 640.

[4] *Ibid*., hlm. 473.

kepada khalayak tentang pandangannya mengenai larangan pemakaian jilbab di SMA Negeri Bali.

B. Latar Belakang

Media merupakan alat komunikasi dan penyampai informasi suatu peristiwa, kejadian, maupun tragedi yang terjadi disekeliling masyarakat. Lebih dari dua ratus tahun media menjadi penghubung antara masyarakat kepada birokrat. Pada zaman modern ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa apa yang masyarakat perlukan dapat diakses dengan mudah.

Website adalah produk layanan menggunakan internet yang berfungsi sebagai alat komunikasi serta untuk mengakses berita tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga berita dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh khalayak. Selain disebut sebagai alat komunikasi (lewat layanan *e-mail, IRC, usenet*, dan sebagainya), internet disebut juga sebagai alat transportasi, kemampuanya dalam menghubungkan, menemukan, maupun memindahkan informasi dengan cepat dan alat dalam menyimpan informasi.

Pers dianggap sebagai *the fourth estate* (kekuatan keempat) dalam sistem kenegaraan setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[5] Sebagai pilar keempat, media dimanfaatkan sebagai pembentuk opini publik maupun sebagai penyalur aspirasi dari rakyat kepada pemerintah, alat penekan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik negara dan pembela keadilan.

---

[5] Zaenuddin HM, *The Journalist*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm.5.

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan seni, budaya, agama, dan ras. Kekayaan seni dan budaya yang dimiliki Indonesia kini perlahan mulai hilang tergerus derasnya zaman dan tergantikan dengan budaya asing, salah satunya adalah pulau Bali yang kini menjadi wisata maupun tempat mata pencaharian penduduk lokal maupun mancanegara. Tidak dipungkiri lagi jika macam-macam agama, ras, berkumpul menjadi satu di pulau tersebut.

Bali merupakan daerah dengan penduduk mayoritas beragama Hindu, untuk menjaga agar tidak terjadi konflik agama serta menjaga kearifan lokal, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan aturan bahwa dalam setiap kegiatan formal tidak diperbolehkan memakai aksesoris keagamaan, salah satunya ketika sekolah.

Pada kasus larangan pemakaian jilbab pada siswi SMA di Bali, lembaga agama, KPAI, dan masyarakat melakukan kecaman terhadap pemerintah Kota Bali dan pihak sekolah, itu menandakan bahwa khalayak telah mencitrakan sesuatu yang buruk terhadap pemerintah dan pihak sekolah yang melarang pemakaian jilbab pada siswi SMA di Bali. Intensitas dan frekuensi yang tinggi dari media dalam memberitakan kasus pelarangan pemakaian jilbab terhadap siswi SMA di Bali menjadikan hasil konstruksi realitas yang dilakukan media dapat dikatakan berhasil membentuk sebuah opini publik yang bukan hanya mempengaruhi sisi kognitif tetapi sisi konatif dari audiens.

Media memiliki fungsi sebagai penyampai berita dan porosnya informasi akan memiliki pengaruh yang significan terhadap pola pikir masyarakat, bahkan isu-isu negatif yang ada di masyarakat akan dimaknai berbeda-beda oleh masyarakatnya tergantung bagaimana media mengkonstruksi fakta.

Republika *online* sebagai media yang dipelopori oleh cendekiawan muslim memiliki ciri khusus bila dibandingkan dengan media lainnya, berita yang berada di website tersebut menjadi menarik untuk diteliti terutama berita-berita menyangkut isu agama dan yang sekarang yang menjadi perbincangan publik adalah berita larangan pemakaian jilbab di SMA Negeri di Bali. Republika online yang dari awal memiliki basis keislaman sangat kuat memberikan sesuatu yang berbeda bagi khalayak dalam meneropong kasus larangan jilbab yang ada di SMA Negeri di Bali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana situs www.republika.co.id mengulas pemberitaan larangan pemakaian jilbab terhadap siswi SMA Negeri di Bali melalui konstruksi teks beritanya?

D. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk:

Mengetahui konstruksi berita larangan pemakaian jilbab dan deskripsi wacana larangan pemakaian jilbab pada situs www.republika.co.id.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam bidang analisis wacana kritis dalam kajian komunikasi.
   b. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan kajian penelitian komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan mengantarkan wartawan agar memperhatikan muatan kepentingan bagi penggunaan bahasa dalam bidang jurnalistik, sehingga secara cermat dapat memahami dan mendeskripsikan kenapa seseorang memilih kata tertentu untuk mengkonstruksi suatu berita.

F. Tinjauan Pustaka

Di antara penelitian ilmiah serupa yang pernah diteliti ialah *Pertama,* penelitian dari Miftahush Shalihah dengan judul "Konstruksi Berita Fatwa Haram Rokok (Studi Analisis Wacana Kritis terhadap Berita Fatwa Haram Rokok pada Harian Republika Edisi 17 Maret-16 April 2010)",[6] mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta tahun 2011. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis berita fatwa haram rokok yang diumumkan oleh Muhammadiyah pada Harian Republika dengan melihat konstruksi berita fatwa haram rokok. Dari hasil penelitian tersebut harian Republika mengkonstruksi fatwa haram yang diumumkan Muhammadiyah, namun harian Republika memaknai bahwa fatwa haram rokok yang diumumkan Muhammadiyah sebagai sesuatu yang tidak perlu dijadikan perdebatan masyarakat. Republika juga memandang bahwa isu fatwa haram rokok tidak hanya menyangkut persoalan agama saja, tapi juga menyangkut masalah kesehatan dan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Pada akhirnya terlihat bahwa Republika mengkonstruksi isu fatwa haram rokok dalam substansi beritanya dengan memberikan penekanan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh rokok serta pendapat tokoh masyarakat dari kalangan pejabat pemerintah, ulama hingga akademisi yang mendukung fatwa haram rokok tersebut. Sedangkan dalam penelitian

---

[6] Miftahush Shalihah, *Konstruksi Berita Fatwa Haram Rokok (Studi Analisis Wacana Kritis terhadap Berita tentang Fatwa Haram Rokok pada Harian Republika Edisi 17 Maret- 16 April 2010),* tesis diajukan kepada Program Pasca Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.

penulis lakukan fokus penelitiannya adalah untuk menganalisis bagaimana Republika online mengkonstruksi berita larangan pemakaian jilbab yang ada di SMA Negeri Bali. Republika memandang larangan pemakaian jilbab di SMA Negeri Bali merupakan pelanggaran HAM serta pihak sekolah yang bersangkutan tidak diperbolehkan membuat aturan sendiri tanpa ada adanya persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, "Konstruksi Realitas Media dan Kekuasaan (Studi Program Infotainment Selebritis dalam Pemberitaan Pornografi di TV)", penelitian ini dilakukan oleh Sukarno M. Adam mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta tahun 2011.[7] Penelitian ini menekankan bahwa kekuasaan kekinian memakai jurus baru dan "ampuh" yaitu melalui instrumen media baik media cetak maupun elektronik, penelitian ini menekankan pada televisi. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough, dalam analisis ini data didapat dari teks dalam infotainment dan hasil wawancara mendalam dengan pengelola media dan audiens. Teori yang digunakan adalah diskursus Michel Foucault dan hegemoni Antonio Gramsci. Diskursus sebagai "senjata" penakluk dan hegemoni sebagai metode penakluk audiens. Hasil penelitian ini menunjukkan

[7] Sukarno M. Adam, *Tesis Konstruksi Realitas Media dan Kekuasaan (Studi Program Infotainment Selebritis dalam Pemberitaan Pornografi di TV),* Tesis Diajukan Program Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011.

beberapa hal penting dimulai dari hasil analisis pertama, teks dalam narasi infotainment, sangat penuh dengan kata dan bahasa sensasionalitas, metafora dan dramatisisasi yang mengarah pada membesar-besarkan berita. Kedua, praktik diskursus, dengan penjelasan dari pihak pengelola infotainmen (produser/reporter), menjelaskan bahwa infotainmen lebih mengedepankan atau mengejar berita yang menarik dengan tujuan profit. Ketiga, praktik sosio-kultural, ditemukan bahwa infotainment lebih sebagai program hiburan, artinya infotainmen telah mampu mengkonstruksi kesadaran palsu dalam kehidupan masyarakat yang berbalut hiburan dengan gaya hidup. Dari tiga tahapan tersebut, bisa dipahami bahwa infotainmen mengedepan profit, pasar dan kepentingan ekonomi-politik media yang sangat kapitalistik. Sedangkan penelitian penulis menekankan pada berita-berita mengenai larangan pemakaian jilbab yang masih dalam perdebatan dari berbagai kalangan pemuka agama, pihak sekolah, KPAI, Pemerintah Bali, dan masyarakat.

Ketiga, penelitian Dian Muslimah yang berjudul "Konstruksi Berita Konflik Pasca Bencana Alam Pada Harian Kompas"[8] mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta tahun 2013. Tujuan Penelitian Dian adalah untuk mengetahui fokus pemberitaan Harian Kompas terhadap situasi pasca bencana alam

[8] Dian Muslimah, *Tesis Konstruksi Berita Konflik Pasca Bencana Alam Pada Harian Kompas*, Tesis diajukan pada Program Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.

dan cara Harian Kompas mengulas konflik yang terjadi pada masyarakat pasca bencana alam gempa bumi di Padang melalui konstruksi teks beritanya dengan memusatkan objek kajiannya pada teks pemberitaan konflik pasca bencana alam gempa bumi dalam harian Kompas edisi bulan Oktober 2009. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga level analisis wacana kritis Teun Van Dijk. Hasil analisis sosial penelitian ini adalah konflik masyarakat pasca bencana alam seperti yang terjadi di Sumatera Barat termasuk dalam konflik perbedaan aspirasi dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan sikap dan persepsi negatif terhadap pihak lain. Sementara hasil analisis kognisi sosial Harian Kompas ditemukan bahwa pengalaman masa lalu menyebabkan Harian Kompas menerapkan gaya jurnalisme kepiting yang bersikap hati-hati terutama dalam mengulas konflik. Serta keberadaan tim penyelaras bahasa yang melakukan penyeragaman bahasa menjadikan gaya bahasa yang digunakan Kompas menjadi halus dan santun. Sedangkan tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk mengetahui konstruksi berita larangan pemakain jilbab pada situs www.republika.co.id.

G. Kerangka Teori

1. Media dan Konstruksi Realitas

Pada dasarnya pembuatan berita yang dilakukan oleh wartawan merupakan proses mengkonstruksikan realitas. Ketika wartawan menemukan sebuah fakta dan menuliskan menjadi sebuah berita maka dapat dimaknai sebagai kegiatan mengkonstruksikan realitas. Berita-berita yang ada di media tidak lebih dari hasil penyusunan realitas yang dibentuk menjadi sebuah cerita.[9] Lahirnya sebuah berita senantiasa dimulai dengan realitas atau fakta dalam bentuk peristiwa. Pengkontruksian realitas hingga membentuk makna atau citra tertentu tergantung pada faktor sistem media massa yang berlaku.

Bahasa merupakan komponen utama media dalam menyampaikan maksud kepada khalayak. Penggunaan bahasa tertentu berimplikasi terhadap kemunculan makna tertentu. Diksi dan cara penyajian suatu realitas juga menentukan bentuk konstruksi realitas yang juga menentukan makna yang muncul. Proses pembuatan berita juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal media serta perangkat pembuat wacana. Faktor internal media seperti ideologi media tersebut serta faktor eksternal seperti tekanan pasar atau pembeli.

---

[9] Alex Sobur, *Analisis Teks Media*: *Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

Mc Combs menyebutkan:

> *The power of the press in America is aprimordial one. It sets the agenda of public discussion and this sweeping the political power in unrestrained by any law. It determines what people will talk and think about an authority that in other nations is reserved for tyrants, priest, parties and mandarins.*[10]

Sebuah konstruksi realitas yang dilakukan oleh wartawan sangat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman khalayak terhadap kasus yang terjadi. Citra sebuah cerita merupakan hasil bagaimana khalayak memaknai wacana dalam bentuk berita yang merupakan hasil konstruksi realitas oleh wartawan. Keberhasilan sebuah media untuk diterima khalayak ditentukan oleh sebuah *"strategic of containment"* dan kemampuannya untuk menyesuaikan dengan karakteristik khalayaknya yang berbeda-beda.[11]

2. Wacana Media dan Ideologi

Ideologi memiliki sifat sosial dan digunakan secara internal di antara anggota kelompok atau komunitas tertentu, sehingga bisa membentuk identitas diri kelompok.[12] Wacana media dapat digunakan oleh kelompok tertentu untuk menampilkan dan memenangkan ideologi mereka. Bagi teoritisi kritis, ideologi bukanlah sebuah konsep yang netral melainkan sebuah sistem kekuasaan dan dominasi. Ideologi

---

[10] Maxwell Mc Combs, *A first Look at Communication theory*, (New York: The McGraw-Hill Companies.Inc).

[11] John Fiske, *Television Culture*, (London: Routledge, 1987), hlm. 283.

[12] Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 14.

adalah kesadaran palsu, kesadaran yang mengacu pada nilai-nilai moral tinggi namun sekaligus menyembunyikan kenyataan bahwa dibelakangnya terdapat kepentingan-kepentingan egois dari kelas yang berkuasa. Karl Marx dan Friendrich Engels melihat ideologi sebagai fabrikasi atau pemalsuan yang digunakan oleh pihak tertentu untuk membenarkan dirinya sendiri sehingga konsep ideologi bersifat subjektif dan hanya untuk melegitimasi kelas penguasa dalam masyarakat.[13]

Proses hegemoni berlangsung melalui media. Kelompok dominan menjadikan ideologi mereka menjadi tampak wajar, natural, beroperasi dengan nalar awam *(Common sense),* sehingga tidak perlu dipertanyakan dan pada akhirnya dapat diterima secara sukarela oleh khalayak. Meski demikian, hegemoni bukan suatu yang permanen atau final, karena individu adalah agen aktif dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh kontradiksi, sehingga hegemoni dipandang sebagai kompetisi atau pertarungan dan kelompok subkultur membentuk budaya tanding *(counter culture).*[14]Hegemoni dibutuhkan namun juga harus bekerja karena pengalaman sosial kelompok subordinat (baik berdasarkan kelas, gender, ras, agama, usia) terus-menerus memberikan gambaran yang bertentangan dengan ideologi dominan yang dipaksakan kepada mereka, dengan kata lain ideologi

[13] Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, hlm. 67

[14] McNair, *Media Society Industries Images and Audiences,* (New Delhi: Fine Forge Press, 2000), hlm.169.

dominan yang dipaksakan kepada mereka. Media mampu menjadi instrumen kontrol dan legitimasi bagi kekuasaan, sekaligus sebagai alat resistensi bagi kekuasaan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode analisis wacana dan lebih khusus memakai analisis wacana kritis *(critical discourse analysis).* Analisis wacana kritis merupakan bentuk praktik sosial yang menyusun dunia sosial dan disusun oleh praktik-praktik sosial yang lain. Sebagai praktik sosial, wacana berada dalam hubungan dialektik dengan dimensi sosial yang lain. Wacana tidak hanya memberikan kontribusi pada pembentukan kembali struktur sosial namun merefleksikan kembali struktur sosial tersebut.[15]

Dalam *critical discourse analysis* ada beberapa model analisis yang kesemuanya berangkat dari pemikiran teori wacana Faucault dan Althusser. Model analisis di antaranya dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Roger Fowler, Theo Van Leeuwen, Sara Mills, Van Dijk, dan Norman Fairclough.

Menurut Van Dijk, analisis wacana kritis digambarkan mempunyai tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Ketiga hal tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan analisis. Van Dijk

[15] Marianne W. Jorgensen dan Louise J. Philips, *Analisis Wacana Teori dan Metode*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.116.

mengemukakan karakteristik analisis wacana kritis sebagai berikut: (1)Tindakan (2) Konteks, (3) Historis, (4) Kekuasaan (5) Ideologi.[16]

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan teks dengan menggunakan pendekatan induktif (landasan teori sebagai acuan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta). Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis dalam level teks dan tidak sampai pada tataran kognisi sosial dan konteks sosial karena keterbatasan penulis dalam mewawancarai dan mencari data dari pihak SMA di Bali.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah situs www.republika.co.id. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah berita kebijakan pemerintah provinsi Bali dan otonomi sekolah melarang pemakaian jilbab pada siswi SMA Negeri di Bali pada situs www.republika.co.id dan wacana yang dibentuk oleh Republika *online* (ROL).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi. Sumber kajian dokumentasi pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui berita terkait larangan pemakaian jilbab pada siswi SMA Negeri di Bali yang dimuat pada situs www.republika.co.id dan data sekunder diperoleh melalui

[16] *Ibid.*, hlm. 8-14.

buku referensi ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan analisis wacana kritis Van Dijk. Penggunaan analisis kebahasaan bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Dalam analisis wacana kritis, Van Dijk membagi menjadi tiga struktur yaitu: teks, kognisi sosial, dan analisis sosial. Peneliti membatasi penelitian hanya pada tingkat struktur teks saja dan tidak sampai pada tataran kognisi sosial dan konteks sosial, karena keterbatasan dalam menggali informasi dari pihak terkait yaitu pihak sekolah SMA Negeri di Bali dan bidang keredaksian Republika *online*.

Struktur pada level teks analisis wacana Vandijk dibagi menjadi tiga elemen yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro (semantiik, sintaksis, stilistik, dan retoris).[17]

a. Analisis Teks

Struktur Wacana	Hal Yang Diamati	Unit Analisis
Struktur Makro	TEMATIK (Apa yang dikatakan?) Elemen: Topik/Tema	Teks

[17] Eriyanto, *Analisis Wacana*, hlm. 227.

	yang dikedepankan dalam suatu berita.	
Superstruktur	SKEMATIK (Bagaimana Pendapat Disusun Dan Dirangkai?)	Teks
Struktur Mikro	SEMANTIK (Apa arti pendapat yang ingin ditekankan dalam teks berita?) Elemen: Latar, Detil, Maksud, Praanggapan, Nominalisasi.	Paragraf
	SINTAKSIS (Bagaimana kalimat "bentuk, susunan" dipilih?) Elemen: Bentuk kalimat, Koherensi, Koherensi Pembeda.	Kalimat dan Proposisi
	STILISTIK Elemen: Leksikon	Kata
	RETORIS Elemen: Grafis, Metafora	Kalimat Proposisi

Pada tabel diatas Van Dijk mendeskripsikan wacana dari elemen yang paling besar sampai yang paling kecil. Secara lebih rinci tentang struktur wacana akan dibahas dibawah ini.[18]

1. Struktur makro

   Srtuktur makro adalah struktur yang menunjuk pada global meaning ‘makna keseluruhan’ yang dapat dicermati melalui topik dan tema dalam sebuah berita di media. Dalam struktur makro terdapat dua elemen yakni topik dan tema. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh wartawan kepada khalayak pembaca. Topik menunjukkan konsep dominan dan menjadi yang paling penting dari isi suatu berita.

2. Super Struktur

   Super struktur menunjuk pada kerangka suatu wacana atau skematik. Teks atau wacana pada umumnya memiliki skema atau alur pendahuluan sampai penutup. Alur atau skema menunjukkan tentang bagaimana bagian-bagian suatu teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk satu kesatuan arti. Pada bagian isi pembuat wacana atau wartawan umumnya melakukan kontrol terhadap skema yang ada dalam wacana tersebut. Bagian mana yang didahulukan serta bagian mana yang kemudian akan diatur demi

[18] *Ibid*., hlm.229-265.

kepentingan pembuat wacana.[19] Penulis dalam hal ini memiliki kuasa dalam mengontrol skema demi melanggengkan kepentingan pembuat pesan. Untuk menjelaskan tentang super struktur Van Dijk menjelaskan bahwa:

> *Overall meanings, i.e topics or macrostructure, may be organized by conventional schemata (superstructure), such as those that define an argument, a conversation or a news report. As is the case for all formal structures, schematic structures are not directly controlled by ideological variation. A reactionary and progressive story are both stories and should both feature specific narrative categories to be a story in the first place.*[20]

Dalam kutipan diatas Van Dijk menjelaskan bahwa untuk kepentingan penyampaian pesan, pembuat pesan mengatur topik sesuai dengan skema yang diinginkan oleh pembuat pesan. Struktur skema tentang sesuatu mana yang harus didahulukan maupun mana yang harus diakhirkan juga akan mempengaruhi kualitas pesan berita yang akan disampaikan oleh wartawan. Strategi wartawan untuk membuat topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyususn bagian-bagian sistematis dengan urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan dan bagian mana yang kemudian bisa sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting.

---

[19] Sakban Rosidi, *Analisis Wacana Kritis Sebagai Ragam Paradigma Kajian Wacana (Critical Discourse Analysis as Variance of Paradigm of Inquiry on Discourse)*, (Malang: UIN Malang, 2007), hlm. 11.

[20] Teun A. Vandijk, *Discourse Analysis as Ideology Analysis Internet Course for the Oberta de Catalunya*, UOC, hlm. 12.

3. Struktur Mikro

Pada struktur mikro menunjuk pada makna setempat *(Local Meaning)* suatu wacana. Dalam struktur mikro dapat dilihat aspek semantik, sintaksis, leksikon.

a. Semantik

Pada aspek semantik suatu wacana mencakup latar, detil, maksud, dan praanggapan.

1) Latar

Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti) yang ingin ditampilkan. Ketika seorang wartawan menulis berita biasanya mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang ditulis menentukan ke arah mana pandangan khalayak akan dibawa kemana. Latar dapat menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dari suatu teks. Maka dari itu, latar teks merupakan elemen yang penting dalam membongkar maksud yang ingin disampaikan oleh wartawan.

2) Detil

Elemen wacan detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya serta menciptakan citra yang

baik, sebaliknya hal yang tidak menguntungkan bagi dirinya akan dikurangi. Dalam mempelajari detil, yang harus diperhatikan adalah dari keseluruhan dimensi peristiwa, bagian mana yang diuraikan secara panjang lebar oleh wartawan? Kenapa wartawan memilih menguraikan dari dimensi tertentu? Apa efek penguraian detil itu terhadap seseorang?

3) Maksud

Elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan diuraikan secara implisit atau tersembunyi. Dalam konteks media, elemen maksud menunjukkan bagaimana secara implisit dan tersembunyi wartawan menggunakan praktik bahasa tertentu untuk menonjolkan basis kebenarannya d menyingkirkan versi kebenarananya dan secara implisit pula menyingkirkan versi kebenaran lain.

4) Praanggapan

Elemen wacana praanggapan *(presupposition)* merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Kalau latar berarti upaya mendukung pendapat dengan jalan memberi latar

belakang, maka praanggapan adalah upaya mendukung pendapat dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya.

5) Nominalisasi

Elemen nominalisasi berfungsi mengubah kata kerja menjadi kata benda (nominal). Dalam hubungannya dengan makna yang ditimbulkan, nominalisasi berhubungan dengan dua hal. Pertama, menimbulkan efek generalisasi. Kedua, nominalisasi merupakan strategi wacana untuk menghilangkan subjek atau pelaku.

b. Analisis Kalimat (Sintaksis)

Aspek sintaksis suatu wacana berkenaan dengan bagaimana frase dan kalimat disusun untuk dikemukakan. Aspek sintaksis mencakup: bentuk kalimat dan koherensi.

Pada analisis sintaksis dijelaskan bahwa:

> *Ideological discourse structures are organized by the constrains of the context models, but also as a function of the structures of the underlying ideologies and the social representations and models controlled by them. Thus, if ideologies are organized by well-known ingroup-outgroup polarization, then we many, as suggested, by pronouns such as us and them, but also by possesive and demonstratives such as our people and those people, respectively.*[21]

[21] *Ibid.*, hlm 16.

Struktur kalimat tidak serta merta disusun berdasarkan pola struktur subjek, objek, predikat, dan objek. Dibalik penyusunan kalimat terdapat sebuah kepentingan kenapa susunan seperti itu, maka dari itu pada pembahasan sintaksis akan dikodekan sesuai penggunaan bentuk kalimat yang digunakan (aktif-pasif), dan koherensi dari kalimat tersebut. Untuk penjelasan singkat tentang bentuk kalimat, koherensi dibahas dibawah ini:

1) Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Logika kausalitas jika diterjemahkan kedalam bahasa menjadi sebuah susunan subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang diterangkan). Dalam kalimat yang berstruktur aktif seseorang menjadi subjek dari pernyataannya, sedangkan dalam kalimat pasif seseorang menjadi objek dari pernyataannya.

2) Koherensi

Koherensi merupakan jalinan antar kata, proposisi atau kalimat. Dua buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan dengan memakai koherensi. Sehingga dua fakta tersebut dapat menjadi berhubungan. Koherensi dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni: (1) koherensi

sebab-akibat, dapat dilihat dari pemakaian kata penghubung yang dipakai untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan, atau memisahkan suatu proposisi dihubungkan dengan bagaimana seseorang memaknai sesuatu yang ingin ditampilkan pada pembaca. (2) koherensi penjelas, ditandai dengan pemakaian anak kalimat sebagai penjelas. Jika ada dua proposisi, proposisi kedua adalah penjelas atau keterangan dari proposisi pertama. (3) koherensi pembeda, berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dua peristiwa atau fakta hendak dibedakan. Dua peristiwa dapat dibuat seolah-plah saling bertentangan dan berseberangan. Kata sambung yang bisa dipakai untuk membedakan dua proposisi ini adalah "dibandingkan, dibanding, ketimbang".

3) Kata Ganti

Elemen kata merupakan elemen yang digunakan untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti dipakai seorang komunikator untuk menunjukkan dimana posisi seseorang dalam wacana. Batas antara komunikator dengan khalayak sengaja dihilangkan untuk menunjukkan apa yang menjadi sikap komunikator.

c. Stilistik

Aspek stilistik berkenaan dengan pilihan kata apa yang dipakai. Aspek stilistik mencakup, leksikon.

Elemen leksikon, elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu.

d. Retoris

Aspek retoris berkenaan dengan bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan. Aspek retoris terdiri dari grafis dan metafora.

1) Grafis

Elemen ini digunakan untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan (yang dianggap penting) oleh seseorang yang dapat diamati dari teks. Dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar. Termasuk didalamnya pemakaian *caption, raster*, grafik, gambar, atau tabel untuk mendukung arti penting suatu pesan.

2) Metafora

Dalam suatu wacana, seorang wartawan tidak hanya menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan, metafora yang dimaksud sebagai ornament atau bumbu dari suatu berita. Akan tetapi pemakaian metafora tertentu bisa menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks. Metafora tertentu dipakai wartawan secara strategis sebagai landasan berpikir, alasan pembenar atas pendapat atau gagasan tertentu kepada publik.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini lebih terarah, integral dan sistematis sehingga lebih mudah dipahami, maka dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub sebagai rincian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan.

A. Penegasan Judul

B. Latar Belakang Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Tinjauan Pustaka

G. Kerangka Teori

H. Metode Penelitian

I. Sistematika Pembahasan

Bab II, membahas tentang isu yang dimunculkan dalam berita. kearifan lokal dan makna jilbab bagi masyarakat Bali.

A. Kondisi umum masyarakat Bali

B. Kearifan lokal Bali

C. Kebijakan Sekolah

D. Pluralisme dan Konflik sosial

E. Jurnalisme di Republika Online

Bab III, membahas tentang berita larangan pemakaian jilbab pada siswi SMA di Bali pada situs www.republika.co.id yang dikonstruksikan. Adapun cara menganalisisnya menggunakan pisau analisis wacana kritis Van Dijk dianalisis sampai pada tingkatan teks.

A. Jilbab dan Kearifan Lokal

B. Jilbab dan Hak Asasi Manusia

C. Jilbab dan Otonomi Sekolah

Bab IV, penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui analisis terhadap struktur makro, maka analisis atas struktur tematik menunjukkan bahwa keberpihakan Republika *online* terhadap umat Muslim sangat kuat. Tema-tema yang diangkat oleh Republika *online* pada intinya menyatakan bahwa pelarangan jilbab di SMA Negeri Bali melanggar hak siswa, pemakaian jilbab di lingkungan sekolah harus diijinkan kembali demi terwujudnya kedamaian antar umat beragama.

Superstruktur menunjukkan bahwa Republika *online* menggunakan pilihan kata bernada menghujat dan kritis terhadap pelarangan jilbab di SMA Negeri Bali. Republika *online* juga menawarkan kisah-kisah tentang pelarang jilbab di Bali beserta proses tindak lanjut kasus tersebut yang dilakukan oleh KPAI, organisasi kemasyarakatan dan beberapa pakar.

Pada struktur mikro dilihat dari semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris dengan penjelasan sebagai berikut:

Struktur semantik dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Elemen latar yang dipakai Republika *online* cenderung langsung menjelaskan pada pokok masalah larangan jilbab. Republika *online* menggunakan detil yang tinggi untuk menyerang gagasan dari komunikan atau pihak yang dianggap bersalah, detil yang

dipakai memperlihatkan beberapa bukti untuk mendukung gagasan komunikator.

- Elemen maksud masih mendukung dari elemen detil yaitu memperlihatkan beberapa bukti dan alasan yang kuat untuk mementahkan gagasan dari komunikan. Pada elemen praanggapan, Republika *online* menyertakan beberapa kutipan untuk mendukung gagasan dari komunikator.
- Elemen nominalisasi menunjukkan bahwa Republika *online* cenderung memperlihatkan bahwa dalam kinerjanya, beberapa elemen masyarakat dan Pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem dan otonomi sekolah, selain itu juga memperlihatkan bagaimana upaya untuk menyikapi kasus larangan pemakaian jilbab di SMA Negeri Bali sehingga jilbab kembali diijinkan oleh sekolah.

Struktur sintaksis, Republika *online* lebih sering menggunakan kalimat aktif tetapi ada juga dijumpai kalimat pasif yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berbau negatif.

- Koherensi sebab akibat banyak ditunjukkan menggunakan kata hubung “karena”, sedangkan koherensi penjelas lebih banyak menggunakan kata hubung “yang” untuk memperjelas kalimat didepannya.

Struktur stilistik, berita yang terdapat pada Republika *online* terdapat unsur leksikon.

- leksikon yang bernada hati-hati ketika menyebut kata-kata berbau dengan agama. Seperti dalam penyebutan kata agama “Islam” juga dipilih kata “Muslim dan keyakinan”.

Struktur retoris diperoleh kesimpulan bahwa,

- Grafis pada Republika *online* cenderung mendukung umat muslim untuk membenarkan dan mendukung gagasan mengenai larangan jilbab yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pelarangan tersebut melanggar hak siswi dan SK Dirjen Dikdasmen yang telah ditetapkan.
- Metafora yang terdapat dalam berita dipakai untuk menyindir pelaku pelarangan jilbab dan sebagai upaya pencegahan kasus yang sama di daerah lain.

B. Saran-saran

1. Media massa memiliki fungsi sebagai penyeimbang dalam sistem pemerintahan, otonomi dan perantara antara birokrat dengan masyarakat. Dari fungsinya tersebut maka media massa harus mampu menyajikan berita-berita yang mendidik, seimbang, dan tanpa berpihak pada satu kalangan tertentu.
2. Wartawan harus mampu bersikap independen dalam membuat pemberitaan. Fakta dan realitas adalah bahan utama dalam pemberitaan, bukan opini atau asumsi wartawan.

3. Keberpihakan wartawan akan membuat berita menjadi kecenderungan dalam satu pihak, sehingga khalayak yang membaca akan ikut terpengaruh dengan isi berita tersebut.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Secara teknis skripsi ini telah dinyatakan selesai namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya peneliti-peneliti selanjutnya yang dapat memperkuat dan menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Alex Sobur, *Analisis Teks Media*: *Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Ahmad Baraas, "Pemprov Bali: Tak Ada Larangan Berjilbab di Sekolah", *www.republika.co.id*, Edisi 10 Maret 2014, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/10/n27nnc-pemprov-bali-tak-ada-larangan-berjilbab-di-sekolah, diakses tanggal 10 Maret 2014.

A. Syalaby Ihsan, "PBNU: Pelarangan Jilbab di Bali Sakiti Umat Islam", *www.republika.co.id*, Edisi 13 Maret 2014, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/03/13/n2dbl8-pbnu-pelarangan-jilbab-di-bali-sakiti-umat-islam, diakses tanggal 13 Maret 2014.

Dahrendorf, Ralf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa-Kritik*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Damanhuri Zuhri, "Bali Bisa Disomasi Soal Jilbab", *www.republika.co.id*, Edisi 13 Maret 2014, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/03/13/n2ctwq-bali-bisa-disomasi-soal-jilbab, diakses tanggal 13 Maret 2014.

_____, "Larang Jilbab Pelanggaran Berat," *www.republika.co.id*, Edisi 12 Maret 2014, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/03/12/n2b4sg-larang-jilbab-pelanggaran-berat, diakses tanggal 12 Maret 2014.

Dian Muslimah, *Konstruksi Berita Konflik Pasca Bencana Alam pada Harian Kompas*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM, 2013.

Dyah Ratna Meta Novia, "Mendikbud: Sekolah Tak Boleh Larang Siswi Berjilbab", *www.republika.co.id*, Edisi 6 Maret 2014 ,http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/06/n20cnb-mendikbud-sekolah-tak-boleh-larang-s, diakses tanggal 6 Maret 2014.

Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Fiske, John, *Television Culture*, London: Routledge, 1987.

Fuji Pratiwi, "PII: SK Dirjen Dikdasmen Halangi Siswi Berjilbab", *www.republika.co.id*, Edisi 5 Maret 2014, http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/05/n1yk5q-pii-sk-dirjen-dikdasmen-halangi-siswi-berjilbab, diakses tanggal 5 Maret 2014.

_____, "Komnas HAM Serukan Umat Bersatu Sikapi Larangan Jilbab di Bali", *www.republika.co.id*, Edisi 5 Maret 2014, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/05/n1yla8-komnas-ham-serukan-umat-bersatu-sikapi-larangan-jilbab-di-bali, diakses tanggal 5 Maret 2014.

_____,"KPAI: Sekolah Negeri Larang Jilbab Pelanggaran Berat", *www.republika.co.id*, Edisi 11 Maret 2014, http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/03/11/n29f5n-kpai-sekolah-negeri-larang-jilbab-pelanggaran-berat, diakses tanggal 11 Maret 2014.

Harimurti Kridasana, *Kamus Linguistik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Joko Sadewo, "Pelarangan Siswi Jilbab di Bali Dilakukan Masif dan Terstruktur?", *www.republika.co.id*, Edisi 5 Maret 2014, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/05/n1ykhm-pelarangan-siswi-jilbab-di-bali-dilakukan-masif-dan-terstruktur, diakses tanggal 5 Maret 2014.

_____, "Sekolah Pelarang Jilbab di Bali Akan Didata", *www.republika.co.id*, Edisi 5 Mret 2014, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/05/n1ykqm-sekolah-pelarang-jilbab-di-bali-akan-didata, diakses tanggal 5 Maret 2014.

M. Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, Dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mc Combs, Maxwell, A *First Look At Communication Theory*, dalam EM, Griffin, New York: The McGraw-Hill Companies. Inc.

Mc Nair, *Media Society Industries Images and Audiences*, New Delhi: Fine Forge Press, 2000.

M. Ibrahim Hamdani, "KPAI Temukan Bukti Tertulis Larangan Jilbab di Bali", *www.republika.co.id*, Edisi 12 Maret 2014, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/12/n2bdtj-kpai-temukan-bukti-tertulis-larangan-jilbab-di-bali, diakses tanggal 12 Maret 2014.

Miftahush Shalihah, *Konstruksi Berita Fatwa Haram Rokok (Studi Analisis Wacana Kritis terhadap Berita Tentang Fatwa Haram Rokok pada Harian Republika Edisi 10 Maret- 16 April 2010)*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM, 2013.

Onong Udjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Philips J, Louise & Jorgensen W, Marianne, *Analisis Wacana Teori dan Metode*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Putu Setia, Bali Menggugat, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

R. Cecep Eka Permana, Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2010.

Sakban Rosidi, *Analisis Wacana Kritis Sebagai Ragam Paradigma Kajian Wacana (Critical Discourse Analysis as Variance of Paradigm of Inquiry on Discourse)*, Malang: UIN Malang, 2007.

Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan: Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Sukarno M. Adam, *Konstruksi Realitas Media dan Kekuasaan (StudiProgram Infotainment Selebritis dalam Pemberitaan Pornografi di TV)*, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM, 2011.

Vandijk A. Teun, *Discourse Analysis as Ideology Analysis Internet Course for the Oberta Catalunya*, UOC, 2003.

Zaenudin HM, *The Journalist*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ita Septiyani

Tempat/Tgl. Lahir : Grobogan, 25 September 1990

Alamat : Dusun Tunggak 1 Rt.01/01 Desa Tunggak Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Nama Ayah : Yahman

Nama Ibu : Darwati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

   a. SD Negeri 1 Tunggak — Tahun 2002

   b. SMP Negeri 1 Toroh — Tahun 2005

   c. SMA Kristen Widya Wacana Purwodadi — Tahun 2008

2. Pendidikan Non-Formal

   a. Latihan Kader I — Tahun 2010

   b. Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar se-Nasional — Tahun 2011

   c. Pelatihan Creative Public Relation — Tahun 2011

   d. Pelatihan Jurnalistik dan Broadcasting Trans TV — Tahun 2011

   e. Pelatihan Jurnalistik Indosiar — Tahun 2012

   f. Pelatihan Kader Sensitif Gender (LKSG) — Tahun 2012

   g. Latihan Khusus KOHATI — Tahun 2012

h. Pelatihan Jurnalistik Dewan Pers Tahun 2013

i. Pelatihan Jurnalistik dan Temu Insan Pers Tahun 2013

j. Workshop Jurnalisme Damai untuk Wartawan
dan Pemimpin Redaksi, BNPT dan Biz Communication Tahun 2014

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Bidang Kekaryaan HMI Komisariat Fakultas Dakwah Tahun 2011
2. Komunitas Duta Muda Trans TV (TRANSMANIA) Tahun 2012
3. Keluarga Mahasiswa Grobogan-Yogyakarta (KAMAGAYO) Tahun 2012
4. Pimpinan Perusahaan Lembaga Pers Mahasiswa Islam Sinergi Tahun 2014
5. Relawan Turun Tangan Yogyakarta Tahun 2014

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Ita Septiyani

Pelarangan Siswi Jilbab di Bali Dilakukan Masif dan Terstruktur?

Wednesday, 05 March 2014, 17:15 WIB

Komentar : 53

Republika/Musiron

Muslimah mengenakan jilbab.

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada dugaan pelarangan penggunaan jilbab di sejumlah sekolah di Bali dilakukan masif dan terstruktur. Sebab mayoritas kepala sekolah yang didatangi selalu berlindung di balik aturan sekolah dan menunggu izin dinas pendidikan.

Wakil Sekjen PB PII, Helmy Al Djufri menyebutkan ada 40 sekolah yang terdata melakukan pelarangan jilbab, baik lisan maupun tulisan. PII sendiri baru memberikan data 31 sekolah dan sembilan sekoah sisanya masih dalam proses peninjauan.

Rata-rata sekolah melarang secara lisan. Sekolah yang membolehkan umumnya sekoah swasta Islam. Data dikumpulkan PII sejak Oktober 2013 hingga Maret 2014."Karena banyaknya sekolah yang melarang, pertaannya sekarang bukan sekolah mana yang melarang, tapi mana yang membolehkan?," ungkap Helmy Al Djufri.

Helmy menyampaikan jumlah bukan poin utama kasus jilbab ini karena walaupun hanya satu, itu akan tetap jadi sorotan dan harus diperjuangkan. Selama ini, jika siswi SMP Muslim ingin tetap berjilbab saat SMA harus pindah, mereka harus pindah sekolah ke Jawa.

Setiap tahun pun PII melakukan advokasi hanya bagi siswi Muslim yang ingin berjilbab di sekolah. PII berharap ada tim investigasi dari Kemendikbud yang mengecek langsung ke lokasi. Mereka juga menyayangkan tidak semua sekolah negeri mempunyai guru pendidikan agama Islam.

Kepada Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud dan Komnas HAM, PII menyerahkan masing-masing satu bundel dokumen berisi laporan PII Wilayah Bali dan tim advokasi dari sejak Oktober 2013hingga Februari 2014, draf perkara jilbab SMAN 2 Denpasar, skema gerakan jangka pendek tim advokasi dan kumpulan berita pelarangan jilbab di Bali.

Terpisah dari bundel, mereka juga memberikan daftar sekolah yang melarang jilbab, kliping berita media lokal dan hasil advokasi kasus jilbab 2002.

Pada 2002 lalu, seorang siswi satu SMP negeri sempat memperkarakan jilbab hingga ke pengadilan, namun kalah. Sampai saat ini PII masih memantau izin jilbab di sekolah itu. PII berharap izin jilbab bisa berlaku di Bali sebelum penerimaan siswa baru Mei mendatang.

PII menekankan jibab diperjuangkan sebagai hak dasar keyakinan dan tidak dikaitkan dengan SARA. PII menyayangkan adanya pemberitaan media lokal yang tidak berimbang.

Share

TAGS #jilbab #larangan jilbab
Redaktur : Joko Sadewo

Sekolah Pelarang Jilbab di Bali akan Didata

Rabu, 05 Maret 2014, 17:20 WIB

Komentar : 59

Republika/Wihdan Hidayat

Muslimah berjilbab (ilustrasi).

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pembinaan SMA Kemebdikbud Harris Iskandar mengungkapkan pihaknya akan mendata semua sekolah di Bali, yang melarang siswinya mengenakan jilbab.

Harris mengatakan bersama Dirjen Pendidikan Menengah sudah bertemu dengan Kepala SMAN 2 Denpasar. Sekolah kini sudah membolehkan siswi Muslim berjilbab.

"Izin berjilbab di SMAN 2 ini berlaku seterusnya, termasuk bagi siswa baru. Kita pantau bersama," kata Harris yang ditemui di kantor Pendidikan Dasar dan Menengah.

Harris menekankan, aturan sekolah tidak boleh lebih ketat dari undang-undang. Pelajaran agamapun harus diajarkan oleh guru yang sama keyakinan agamanya.

Jumlah sekolah yang melanggar perlu didata, karena akan jadi poin evaluasi Kemendikbud. Harris mengungkapkan selama ini Kemendikbud terhambat otonomi daerah yang membuat kemendikbud tidak bisa mengintervensi langsung ke sekolah, tapi harus melalui dinas pendidikan dan bupati.

Harris mengaku ini menyedihkan. Ia tidak ingin Indonesia seperti Prancis yang melarang jilbab di institusi pemerintahan. "Ini akan kami perjuangkan. Kami akan mencari cara-cara persuasif," kata Harris.

Harris menerima usulan revisi pasal 10 ayat 3 dalam SK Dirjen Dikdasmen. Namun ia tidak bisa memastikan kapan semua sekolah di Bali akan mulai mengizinkan jilbab.

Tweet

TAGS #jilbab #larangan jilbab
Redaktur : Joko Sadewo

Komnas HAM Serukan Umat Bersatu Sikapi Larangan Jilbab di Bali

Rabu, 05 Maret 2014, 17:32 WIB

Komentar : 252

Republika/Wihdan Hidayat

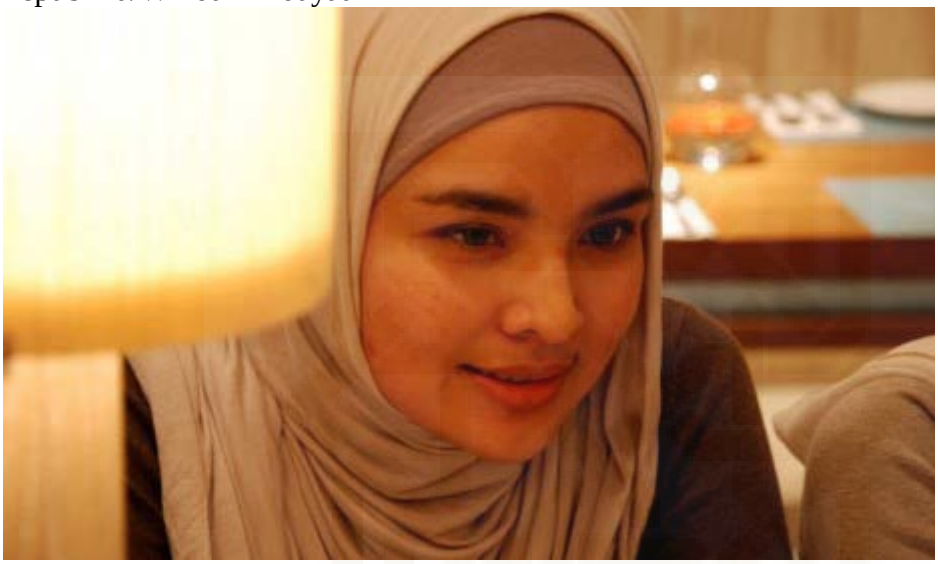

Muslimah berjilbab (ilustrasi).

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution kembali menyerukan bersatunya umat Islam terkait kasus jilbab di sekolah-sekolah di Bali.

Jika ada sekolah yang memberi arahan muridnya untuk tidak memberikan informasi, bisa dikenai aturan keterbukaan informasi. Ia juga menyarankan PII untuk juga memberdayakan tokoh-tokoh yang dekat dengan orang pemerintahan.

Maneger mengatakan Pemkot Denpasar sempat bertanya apakah jilbab itu aturan agama atau budaya Islam? Oleh karena itu, selain pendekatan personal ke sekolah, perlu tetap lakukan pendekatan budaya. "Sebab itu ada usulan dialog antar agama yang difasil FKUB. Jadi tidak hanya soal rumah ibadah, tapi juga pakaian atau atribut agama lain," tutur dia.

Dalam waktu dekat ini Komnas HAM akan bertemu perwakilan Kemendik dan Kemenag terkait kasus jilbab di Bali ini. Maneger mengatakan HAM tidak ada kaitan dengan pemilu. Jadi penyelesaian kasus ini harus tetap jalan. Apalagi waktu penerimaan siswa baru semakin dekat.

Wakil Ketua I Komnas HAM Imdadun Rahmat menuturkan hak beragama melekat pada semua orang. Memilih dan meyakini suatu agama, tidak boleh diganggu oleh siapapun.

Mengamalkan dan membentuk masyarakat sesuai agamanya, lanjut Imdadun, bisa dibatasi

dengan persyaratan ketat yakni mengganggu ketertiban umum, mengganggu kesehatan masyarakat, bertentangan dengan moral publik, dan melanggar hak dasar orang lain. Pembatasannya pun hanya boleh dilakukan negara.

"Apa jilbab melanggar empat hal itu? Pelarangan jilbab di manapun itu melanggar hak. Kasus ini perlu digemakan, agar wilayah lain tidak melakukan pelarangan serupa, " tutur dia. Ajaran agama yang mengajak bunuh diri, bisa dilarang karena melanggar empat poin itu.

Masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman. Mayoritas dan minoritas bisa tukar berbuat kebaikan dan hidup bersama.

Share

TAGS #jilbab #larangan jilbab
Reporter : Fuji Pratiwi
Redaktur : Joko Sadewo

PII: SK Dirjen Dikdasmen Halangi Siswi Berjilbab

Rabu, 05 Maret 2014, 17:08 WIB

Komentar : 14

Republika/Musiron

Muslimah mengenakan jilbab.

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai tindak lanjut perlarang jilbab di berbagai sekolah di Bali, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) melakukan audiensi dengan Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud dan Komisioner Komnas HAM.

Dalam pertemuan, Rabu (5/3), PII melihat , berjilbab di sekolah bukanlah hal biasa di Bali. Meski sudah ada aturannya dalam SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 tahun 1991.

Saat SK Dirjen nomor 100 tahun 1991 itu ditunjukkan ke Kepala SMAN 2 Denpasar, ia mengaku baru tahu bahwa ini diatur secara nasional dan akhirnya membolehkan jilbab. "Saat kami datangi, mayoritas kepala sekolah mengatakan otonomi sekolah adalah payung di atas segala payung hukum," kata Wakil Sekjen PB PII, Helmy Al Djufri.

PII mengajukan usulan penghapusan pasal 10 ayat 3 SK Dirjen Dikdasmen itu. Sebab isinya mengharuskan siswi yang ingin berjilbab meminta izin orangtua.

Poin ini rawan dimanfaatkan untuk mengadu argumen orangtua dan anak mereka yang ingin berjilbab. "Sudah diperintahkan Allah SWT, kenapa harus minta izin lagi?," kata Helmy.

TAGS #jilbab #larangan jilbab
Reporter : Fuji Pratiwi
Redaktur : Joko Sadewo

Mendikbud: Sekolah Tak Boleh Larang Siswi Berjilbab

Kamis, 06 Maret 2014, 16:21 WIB

Komentar : 1

Republika/Rakhmawaty

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelajar Islam Indonesia (PII) menyatakan, sekitar 40 sekolah di Bali tidak memperbolehkan siswinya mengenakan jilbab. Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, sekolah tidak boleh melarang siswanya memakai jilbab karena itu masalah agama.

"Jangan sampai hanya karena memakai jilbab, seorang siswa tidak boleh ikut proses belajar mengajar. Sebab belajar merupakan hak asasi," kata Nuh di Jakarta, Kamis, (6/3).

Pokoknya, ujar Nuh, sekolah tidak boleh melarang siswanya pakai jilbab titik. "Itu saja intinya," ujarnya.

Sementara itu Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan, permasalah soal jilbab di Bali sudah jelas. "Sudah ada pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan di Bali, kalau siswa dan siswi boleh mengenakan pakaian sesuai dengan kepercayaan masing-masing agamanya," katanya.

Jadi, ujar Musliar, siswi tidak perlu khawatir lagi, kalau mau memakai jilbab. Sebab, lanjut dia, hal itu diperbolehkan.

TAGS #mohammad nuh #menteri pendidikan dan kebudayaan

Reporter : Dyah Ratna Meta Novia

Redaktur : Fernan Rahadi

Pemprov Bali: Tak Ada Larangan Berjilbab di Sekolah

Senin, 10 Maret 2014, 15:02 WIB

Komentar : 4

Republika/Musiron

Muslimah mengenakan jilbab.

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Tjok Istri Agung Kusumawardhani, mengatakan di Bali tidak ada sekolah yang melarang penggunaan jilbab bagi para siswanya. Kendati demikian kata Kusumawardhani, sekolah punya kewenangan mengatur sendiri masalah yang ada di sekolah masing-masing.

"Sesuai dengan otonomi atau managemen berbasis sekolah, kepala sekolah bersama komite dan guru, berhak membuat kebijakan-kebijakannya di internasl sekolah," kata Kusumawardhani di Denpasar, Senin (10/3).

Hal itu dikemukakannya menjawab *Republika* sehubungan laporan Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) kepada Mendikbud. Berdasar hasil investigasi yang dilakukan PII, ditemukan sebanyak 40 sekolah di Bali yang melarang siswanya mengenakan pakaian khas, sebagaimana yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen noor 100 tahun 1991.

Ketika ditanya, apakah kebijakan sekolah boleh bertentangan dengan kebijakan Dirjen, Kusumawardhani agak ragu mengatakan, apakah ada yang bertentangan itu ya. "Rasa-rasanya tidak ada kok sekolah yang melarang jilbab," katanya.

Mengenai rencana Kemendikbud menjadikan SK Dirjen Dikdasmen nomor 100 tahun 1991 enjadi Keputusan Menteri, Kusumawardhani mengatakan belum mengetahui hal itu. Sambil memanggil Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Bali, Dr Made Alit Mariana, dikatakannya kalau belum mendengar informasi itu.

Bahkan katanya, hal itu tidak dibahas dalam pertemuan Mendikbud dengan pejabat dinas pendidikan seluruh Indonesia. "Ini Pak Ali ikut dalam pertemuan kemarin, kan itu tidak dibahas ya Pak," kata Kusumawardhani menanyakan hal itu pada Alit Mariana.

TAGS #jilbab #sma
Reporter : ahmad baraas
Redaktur : Muhammad Hafil

Larang Jilbab Pelanggaran Berat

Wednesday, 12 March 2014, 12:05 WIB

Komentar : 3

Pelajar berjilbab, ilustrasi

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: **Fuji Pratiwi**

Diskriminasi siswi berjilbab merupakan kekerasan psikis dan mental.

JAKARTA -- Pelarangan jilbab di sekitar 40 sekolah negeri di Bali merupakan pelanggaran berat. Apalagi, menjalankan keyakinan agama termasuk berjilbab merupakan hak setiap warga negara, tak bisa dikurangi siapa pun.

‘’Ini pelanggaran berat karena pelakunya alat negara. Ini *human rights crime*,’’ kata Komisioner *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat* Rita Pranawati di sela pertemuan dengan Tim Advokasi Jilbab Bali, Selasa (11/3).

Sekolah negeri, kata Rita, merupakan bagian dari negara yang punya posisi netral. KPAI mungkin bisa memaklumi jika pelarangan itu dilakukan sekolah khusus agama. Menurut dia, terhambatnya siswi di Bali untuk berjilbab bentuk diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan kebebasan berpendapat anak-anak harus dihargai, termasuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. ’’Jika dengan berjilbab siswi didiskriminasi, ini bentuk kekerasan psikis dan mental.’’

KPAI akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui surat dan telepon. Rita juga mengatakan, tim KPAI bisa juga diturunkan ke Bali. Hak beragama, jelas dia, tak boleh dikurangi. Anak dengan kekurangan fisik saja harus difasilitasi apalagi jilbab.

Terkait nasib korban pelarangan jilbab yang mungkin mendapat intimidasi pascapelaporan ini, Rita mengatakan, mereka akan dilindungi. Jika pun pelarangan ini hanya terjadi pada satu siswi Muslim, itu sudah cukup untuk diusut.

Dalam pertemuan dengan KPAI, Ketua *Tim Advokasi Jilbab Bali* Helmy al-Djufri

menyerahkan data sekolah-sekolah yang melarang penggunaan jilbab dan salinan buku saku siswa SMP 1 Singaraja, Kabupaten Buleleng, yang berisi larangan berjilbab.

Pada Bab I Pasal 2 buku saku tersebut, dinyatakan, khusus perempuan poin (c) *Tidak memakai jilbab.* Rita mengaku, KPAI belum pernah menerima aduan pelarangan jilbab di sekolah. Menurut Naswardi, dari Pokja Bidang Pengawasan KPAI, persoalan ini jadi fokus lembaganya.

Ini terkait pemenuhan hak anak kelompok minoritas. Muslim merupakan minoritas di Bali yang mayoritas berpenduduk Hindu. Naswardi mengatakan, pelarangan jilbab adalah diskriminasi di lingkungan sekolah dan bertentangan dengan UU Perlindungan Anak.

‘’Aturan sekolah seharusnya merujuk pada aturan di atasnya. Jika bertentangan, itu tidak bisa dibenarkan,’’ kata Naswardi. Ia menjelaskan, dalam konteks ini KPAI berperan sebagai pengawas dan berjanji melakukan pengawasan dengan baik.

Kasus pelarangan jilbab yang menimpa Anita Whardani, siswi SMAN 2 Denpasar, kata dia, hanya bagian kecil dari kasus yang ada. Sekarang ada kasus larangan lagi di sekolah lainnya. Ia menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun wajib melindungi anak.

’’KPAI mempunyai tugas agar itu berjalan dengan baik dan benar,’’ kata Naswardi. Ketua Tim Advokasi Jilbab Bali Helmy al-Djufri menjelaskan, kasus pelarangan jilbab terjadi di banyak sekolah di Bali. Pada Oktober 2013, yang mencuat kasus Anita Whardani.

Anita baru diizinkan menggunakan jilbab pada Januari 2014 setelah tim advokasi datang ke Bali. Sudah sejak SMP Anita memakai jilbab, begitu pula foto di ijazah SMP. Saat masuk SMA, ia diminta melepas jilbabnya.

Karena masuk sekolah favorit, orang tua Anita memintanya mengikuti saja aturan sekolah. Selama dua setengah tahun Anita harus bongkar pasang jilbab saat sekolah. Tim bertemu kepala SMAN 2 Denpasar, forum kerukunan umat beragama, dinas pendidikan, dan DPRD.

Setelah pertemuan itu, ungkap Helmy, Anita diizinkan menggunakan jilbab oleh kepala SMAN 2 Denpasar. ‘’Sebelumnya, guru agama juga memilih mengikuti aturan sekolah. Semacam ada konsensus,’’ kata Helmy.

Di SMAN 2 Denpasar, memang tidak ada aturan tertulis, tetapi kepala sekolah beralasan belum mengakomodasi jilbab dan bukan melarang. Begitu pula sekolah lain. Mereka membuat aturan multitafsir dengan melarang penggunaan tutup kepala atau atribut keagamaan.

Sebenarnya, ada aturan negara yang mengatur seragam bagi siswi berjilbab. Yakni, SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991. Namun, sekolah di Bali bertameng otonomi sekolah untuk membuat aturan yang bertentangan dengan SK tersebut.

Helmy juga menyayangkan pendidikan agama Islam di Bali sekadarnya. Guru agama Islam masih sedikit sehingga siswa Muslim terpaksa belajar sendiri.

TAGS #nusantara #denpasar
Redaktur : Damanhuri Zuhri

KPAI Temukan Bukti Tertulis Larangan Jilbab di Bali

Rabu, 12 Maret 2014, 15:20 WIB

Komentar : 8

KPAI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bukti-bukti tertulis terkait pelarangan jilbab oleh sejumlah sekolah di Bali.

Berdasarkan bukti-bukti ini, KPAI sedang turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data mengenai hal-ihwal pelarangan jilbab itu. KPAI pun sudah menerima sejumlah pengaduan terkait hal ini.

Informasi itu diungkapkan anggota KPAI bidang Hak Sipil dan Perlindungan Anak, Rita Pranawati, Rabu siang (12/3), usai konferensi pers "Deklarasi Gerakan Semesta Perlindungan Anak' di Gedung KPAI, Jakarta.

"Terdapat bukti-bukti tentang sejumlah sekolah melarang penggunaan jilbab di Bali. Jelas tertulis tidak boleh memakai jilbab di salah satu sekolah di Bali," tutur Rita Pranawati.

Terkait hal ini, lanjut Rita Pranawati, ada beberapa persoalan seperti otonomi sekolah dan siswa tidak boleh menggunakan jilbab. Akibat otonomi sekolah, sekolah menjadi berhak mengatur semua hal tentang siswa, termasuk tidak boleh memakai jilbab di sekolah.

Namun, papar Rita Pranawati, peraturan sekolah ini jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya tentang kebebasan siswa untuk melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.

Hak ini harus dilindungi oleh semua pihak, ujar Rita Pranawati, karena diatur dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jadi, saat ini KPAI sedang melakukan verifikasi data dan berkoordinasi dengan pihak sekolah serta dinas pendidikan di Bali.

"Jika sudah ada hasilnya, kami akan informasikan ke semua pihak, termasuk media. Yang pasti negara harus menyediakan perlindungan dan menghargai (to fill/ to protect) terhadap hak-hak warga negara," tegas Rita Pranawati.

Reporter : Muhammad Ibrahim
Hamdani
Redaktur : Muhammad Hafil

Bali Bisa Disomasi Soal Jilbab

Kamis, 13 Maret 2014, 10:05 WIB

Komentar : 2

Pelajar berjilbab, ilustrasi

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID,

Sekolah negeri seharunya menjadi rumah bersama bagi seluruh siswanya.

JAKARTA -- *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)* mendapatkan bukti tertulis pelarangan jilbab di puluhan sekolah negeri di Bali.

Terkait hal ini, somasi terhadap Pemerintah Provinsi Bali memungkinkan dilakukan. Ada sekitar 40 sekolah yang memberlakukan larangan jilbab.

‘’Jelas tertulis tidak boleh memakai jilbab di salah satu aturan sekolah di Bali,’’ kata Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat Rita Pranawati seusai *Deklarasi Gerakan Semesta Perlindungan Anak* di Jakarta, Rabu (12/3).

Berdasarkan bukti-bukti ini, ujar Rita, tim KPAI sedang turun ke lapangan. Tim ini memverifikasi bukti pelarangan tersebut. Nanti ada koordinasi dengan pimpinan sekolah yang melarang jilbab dan Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Rita mengatakan, jika sudah ada hasil verifikasi, KPAI akan mengungkapkannya ke publik. Hasil verifikasi, akan menjadi landasan kemungkinan somasi terhadap Pemerintah Provinsi Bali. ‘’Kita lihat prosesnya. Yang jelas larangan itu melanggar hak asasi manusia.’’

Kalau memang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, jelas Rita, maka cara itu yang ditempuh. Ia beralasan, masa depan siswi yang memakai jilbab di sekolahnya masih panjang. Jadi ini bukan sekadar persoalan hak berjilbab.

Ia menuturkan, otonomi daerah menjadi alasan bagi sekolah untuk menetapkan aturan yang melarang siswi mengenakan jilbab. Namun, peraturan sekolah itu mestinya tak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945.

Konstitusi menyebutkan, setiap warga negara berhak untuk menjalankan keyakinan agamanya. Mengenakan jilbab merupakan salah satu bentuk keyakinan seorang Muslimah. Seharusnya, kata Rita, sekolah negeri menjadi rumah bersama bagi siswanya.

Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh mengatakan KPAI ada dua kemungkinan terkait larangan jilbab ini. Bisa saja yang bersalah adalah sekolah sebagai pembuat aturan. Namun, bisa juga Pemerintah Provinsi Bali jika kebijakan itu bersifat sistemik.

‘’Problemnya ada di sekolah. Lalu, apakah itu sistemik atau kebijakan lokal di sekolah?’’tanyanya. Kalau hanya kebijakan lokal sekolah, kepala sekolahnya yang bermasalah. Namun, kalau diberi payung hukum dan dibenarkan Pemerintah Provinsi Bali maka mereka yang bersalah.

Niam mengungkapkan, KPAI sudah menerima pengaduan langsung dan akan melakukan advokasi. Selanjutnya komisi ini berkoordinasi pula dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah-sekolah yang melarang jilbab.

Ketua *Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak* Seto Mulyadi, menyatakan baru saja mendapatkan laporan tentang pelarangan jilbab oleh beberapa sekolah di Bali. Ia segera menghubungi Lembaga Perlindungan Andak di Bali untuk mengkritisi kebijakan itu.

Seto menegaskan, jangan sampai ada pelanggaran hak anak dalam hal apapun juga. ‘’Termasuk melarang mereka menjalankan ibadah, memakai busana sesuai adat, tradisi, atau moral yang ada di agama masing-masing.’’

Bahkan menurut Seto, ada potensi melayangkan somasi atau tuntutan pidana terkait larangan jilbab di sejumlah sekolah di Bali. ’’Kalau sampai hal itu memang perlu dilakukan, tentu kita akan melakukannya,’’ katanya menegaskan.

TAGS #nusantara #bali
Reporter : c57
Redaktur : Damanhuri Zuhri

PBNU: Pelarangan Jilbab di Bali Sakiti Umat Islam

Thursday, 13 March 2014, 16:27 WIB

Komentar : 1

Sejumlah perempuan belajar memakai jilbab syar'i pada Tutorial jilbab syar'i pada acara Gerakan Menutup Aurat Internasional (GMAI) di Car Free Day (CFD), Jl Ir H Djuanda, Kota Bandung, Ahad (23/2). (Republika/Edi Yusuf)

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan pelarangan jilbab di 40 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Bali. Ketua PBNU Maksum Machfoedz mengungkapkan, pelarangan ini sangat menyakitkan bagi umat Islam.

Menurutnya, dilarangnya jilbab di beberapa sekolah di Bali dapat mengoyak kedamaian hanya karena kepentingan sesaat, fanatisme kelompok dan antipati tanpa alasan jelas. Apalagi ada pemaksanaan kehendak yang sangat menyakitkan bagi orang lain.

"Dalam merespon peristiwa pelarangan jilbab di Bali, kita harus melihat prinsip ke-NU-an yang sangat mulia ajarannya. Kita berangkat dari "fikrah nahdliyah," yakni pola pikir NU yang moderat, tegak-lurus, seimbang dan tolerance (tawasuth-i'tidal-tawazun-tasamuh)," tegas Maksum Machfoedz lewat surat elektronik, Kamis (13/3).

Pola pikir "Fikrah Nahdliyyah" itu merupakan landasan kemasyarakatan Islam yang jauh sebelumnya sudah dideklarasikan oleh NU dan para pendirinya. Jadi, lanjut Maksum Machfoedz, "Peaceful Coexistence" dan hidup rukun berdampingan adalah hal utama yang harus dikedepankan oleh NU yang dipimpin oleh para Kiai.

Tentu saja prioritasinya, jelas Maksum Machfoedz, peristiwa ini harus ditempatkan pada hak-hak azasi yang kita yakini telah ditegakkan jauh-jauh hari sebelum NU berdiri, bahkan sebelum timbulnya "Universal Declaration of Human Rights".

"Hak Asasi Manusia (HAM) itu diadopsi dari pemikiran yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi pada abad keenam Hijriyah. Menurut Imam Asy-Syatibi, HAM itu meliputi: "Hifdzud-Diin, HifdzunNafs, Hifdzul 'Aql, Hifdzul Maal, serta Hifdzil 'Irdl wan Nasl," jelas Maksum Machfoedz.

Jika terjemahkan secara berturut-turut, lanjut Maksum Machfoedz, butir-butir HAM itu menjadi: "Perlindungan terhadap keberagamaan, Keselamatan jiwa, Kebebasan berpikir, Pemilikan harta-benda, serta Hak asasi privat dan Rumah tangga yang non-diskriminatif".

TAGS #jilbab #jilbab bali
Reporter : C57
Redaktur : A.Syalaby Ichsan

KPAI: Sekolah Negeri Larang Jilbab, Pelanggaran Berat

Tuesday, 11 March 2014, 13:53 WIB

Komentar : 1

Republika/Musiron

Muslimah mengenakan jilbab.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Advokasi Jilbab Bali resmi melaporkan kasus pelarangan jilbab di Bali ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebagai penyelenggara negara, sekolah negeri yang melarang jilbab dianggap melakukan pelanggaran berat.

Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat, Rita Pranawati, menjelaskan menjalankan keyakinan agama adalah hak yang tidak bisa dikurangi siapapun. Negara hanya bertugas untuk mengatur, tidak mengurangi. Undang-undang dasar juga sudah mengatur itu.

Sekolah negeri merupakan bagian negara yang punya posisi netral. KPAI mungkin bisa memaklumi jika pelarangan itu dilakukan di sekolah khusus agama. ‘’Ini pelanggaran karena pelakunya alat negara. Ini pelanggaran berat, *human right crime*,’’ ungkap Rita saat ditemui di Kantor KPAI, Selasa (11/3).

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, anak-anak boleh memilih dan diasuh orang tua yang satu agama. Anak-anak juga berhak tumbuh berkembang sesuai usianya. Kebebasan berpendapat anak-anak juga dihargai, termasuk perlindungan dari diskriminasi.

‘’Jika dengan menggunakan jilbab siswa didiskriminasi, ini adalah bentuk kekerasan psikis dan mental. Ini tidak boleh dilakukan,’’ kata Rita, Senin (10/3).

TAGS #larangan jilbab #jilbab bali

Reporter : Fuji Pratiwi

Redaktur : Fernan Rahadi